UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Implementasi Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman di Kota
Yogyakarta ditinjau dari Pendekatan Kepatuhan Perpajakan dan Kaitannya dengan Asas Keadilan**
Safira, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PENDEKATAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DAN KAITANNYA DENGAN ASAS KEADILAN

Safira[1] dan Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D.[2]

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman di Kota Yogyakarta, perbandingan kepatuhan antara wajib pajak usaha besar dan kecil serta mengetahui persepsi wajib pajak terhadap Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman pada Kota Yogyakarta dari aspek keadilan dalam perpajakan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris normatif. Sifat penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif dengan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data yang ada di dalam penulisan hukum ini diperoleh dari hasil kepustakaan dan penelitian lapangan dengan memilah-milah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang selanjutnya disusun secara sistematis dan dikaitkan dengan aturan yang relevan.

Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, implementasi pemungutan PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kota Yogyakarta oleh BPKAD Kota Yogyakarta telah berjalan baik dan sesuai peraturan tetapi masih terdapat kelemahan akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Kedua, usaha besar cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dari usaha kecil. Ketiga, sebagian besar wajib pajak menilai bahwa sistem perpajakan yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan.

Kata Kunci: Pemungutan, PBJT Makanan dan/atau Minuman, Kepatuhan Pajak, Asas Keadilan

[1] Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2] Dosen Departemen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Implementasi Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman di Kota
Yogyakarta ditinjau dari Pendekatan Kepatuhan Perpajakan dan Kaitannya dengan Asas Keadilan**
Safira, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF TAX COLLECTION ON CERTAIN GOODS AND SERVICES (PBJT) OF FOOD AND/OR BEVERAGES IN YOGYAKARTA CITY IN TERMS OF TAX COMPLIANCE APPROACH AND ITS RELATION TO THE PRINCIPLE OF JUSTICE

Safira[3] and Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D.[4]

The purpose of this research is to find out about the implementation of the collection of Specified Goods and Services Tax (PBJT) Food and/or Beverages in the City of Yogyakarta, the comparison of compliance between large and small business taxpayers and to find out the taxpayer's perception of the Specified Goods and Services Tax (PBJT) Food and/or Beverages in the City of Yogyakarta from the aspect of justice in taxation

This research uses normative empirical legal research methods. The nature of the research conducted is descriptive by explaining everything related to the research results. This research uses a qualitative method, the data in this legal writing is obtained from the results of literature and field research by sorting the data obtained from the results of literature research and field research which are then arranged systematically and associated with relevant rules.

The result of this research is three conclusions. First, the implementation of PBJT Food and/or Beverage collection in Yogyakarta City by BPKAD Yogyakarta City has been running well and in accordance with regulations but there are still weaknesses due to lack of understanding and awareness of taxpayers. Second, large businesses tend to have a higher level of compliance than small businesses. Third, most taxpayers consider that the current tax system does not fully reflect the principle of justice.

Keywords: Collection, Food and/or Beverage PBJT, Tax Compliance, Principle of Fairness

[3] *Undergraduate Student of Tax Law Department in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*

[4] *Lecturer of Tax Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta*.